

**ANALISIS *MAQĀSĪD ASY-SYARĪ'AH* TERHADAP
PENETAPAN PERMOHONAN PERKARA PENGANGKATAN
ANAK BAGI PEMOHON MUSLIM DI PENGADILAN NEGERI
PATI**

(Studi Terhadap Penetapan No.69/Pdt.P/2019/PN. Pti)

SKRIPSI

Oleh

NALIA NI'AM

NIM. C91217135



**UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A**

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Fakultas Syari'ah dan Hukum

Jurusan Hukum Perdata Islam

Program Studi Hukum Keluarga

Surabaya

2021

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Nalia Ni'am
Nim : C91217135
Fakultas/Jurusan/Prodi : Syari'ah dan Hukum/ Hukum Perdata Islam/
Hukum Keluarga
Judul Skripsi : Analisis *Maqāsid Asy-Syarī'ah* Terhadap
Penetapan Permohonan Perkara Pengangkatan
Anak Bagi Pemohon Muslim di Pengadilan
Negeri Pati
(Studi Terhadap Penetapan No.
69/Pdt.P/2019/PN. Pti)

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Sidoarjo, 9 Februari 2021

Saya yang menyatakan,

A 1000 Rupiah Indonesian postage stamp is shown with a signature over it. The stamp features the Garuda Pancasila emblem and the text 'SEPAJAN RIBU RUPIAH', '1000', 'METERAL', and 'TEMPEL'. The serial number '5A545A/X017204510' is visible at the bottom.

Nalia Ni'am

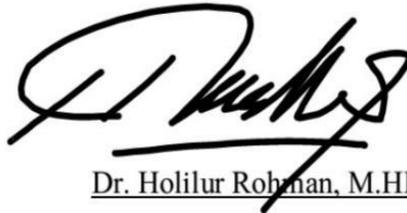
C91217135

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Nalia Ni'am NIM. C91217135 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 8 Februari 2021

Pembimbing,



Dr. Holilur Rohman, M.HI

NIP. 198710022015031005

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Nalia Ni'am NIM. C91217135 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Ampel pada hari Rabu, tanggal 07 Juli 2021, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata dalam Ilmu Hukum Keluarga Islam.

Majelis Munaqasah Skripsi :

Penguji I



Dr. Holilur Rohman, M.HI
NIP. 198710022015031005

Penguji II,



Dr. Nurul Asyiah Nadhifah, M.HI
NIP. 197504232003122001

Penguji III,



Adhi Dimyatt, M.E.I
NIP.197708262005011006

Penguji IV,



Elly Uzlifatul Jannah, M.H
NIP. 199110032019032018

Surabaya, 15 Juli 2021

Mengesahkan,

Fakultas Syari'ah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Dekan,



Prof. Dr. H. Masruhan, M. Ag
NIP. 195904041988031003



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpustakaan@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Nalia Ni'am
NIM : C91217135
Fakultas/Jurusan : Syari'ah Dan Hukum/Hukum Perdata Islam
E-mail address : nalianiam1999@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Sekripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)
yang berjudul :

ANALISIS MAQĀSĪD ASY-SYARĪ'AH TERHADAP PENETAPAN PERMOHONAN PERKARA PENGANGKATAN ANAK BAGI PEMOHON MUSLIM DI PENGADILAN NEGERI PATI
(Studi Terhadap Penetapan No.69/Pdt.P/2019/PN.Pti)

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 12 Juli 2021

Penulis



(Nalia Ni'am)

nama terang dan tanda tangan

analisis *Maqāsid Al-Syarī'ah* terhadap penetapan permohonan pengangkatan anak bagi pemohon muslim pada perkara nomor : 69/Pdt.P/2019/PN. Pti. Sehingga bermanfaat bagi mahasiswa fakultas syariah dan hukum serta civitas akademika Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya yang ingin lebih mendalami terkait masalah analisis *Maqāsid Al-Syarī'ah* terhadap penetapan permohonan pengangkatan anak bagi pemohon muslim di Pengadilan Negeri serta bermanfaat bagi semua pihak yang berkepentingan dengan inti permasalahan.

2. Secara praktis

Secara praktis, penelitian ini bermanfaat untuk semua pihak yang terkait dalam bidang peradilan, baik pihak dari peradilan maupun pihak yang berpekar. Diharapkan dengan adanya penelitian ini akan dapat memberikan sumbangan pemikiran yang dapat dipergunakan oleh alat penegak hukum dan pihak-pihak lain yang berkecimpung dalam usaha penetiban dan pelaksanaan peraturan perundang-undangan No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, sehingga dapat mengurangi praktik pengangkatan anak yang kontradiksi dengan undang-undang.

G. Definisi Operasional

Untuk memudahkan dalam memahami judul skripsi “Analisis *Maqāsid Al-Syarī'ah* Terhadap Penetapan Permohonan Pengangkatan Anak Bagi Pemohon Muslim (Studi Terhadap Penetapan No. 69/Pdt.P/2019/PN. Pti)” maka dirasa perlu untuk menjelaskan secara operasional agar terjadi kesepahaman judul skripsi ini. Beberapa istilah adalah :

- (a) Memelihara akal dalam peringkat *daruriyyat*, seperti diharamkan meminum minuman keras. Jika ketentuan ini tidak diindahkan, maka akan berakibat terancamnya eksistensi akal.
 - (b) Memelihara akal dalam peringkat *hajiyyat*, seperti dianjurkannya menuntut ilmu pengetahuan. Sekiranya hal itu dilakukan, maka tidak akan merusak akal, tetapi akan mempersulit diri seseorang dalam kaitannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan.
 - (c) Memelihara akal dalam peringkat *tahsiniyyat*, seperti menghindarkan diri dari menghayal atau mendengarkan sesuatu yang tidak berfaedah. Hal ini erat kaitannya dengan etiket, tidak akan mengancam eksistensi akal secara langsung.
4. Memelihara Keturunan (*Hifzh Al-Nas*)

Mempunyai keturunan merupakan salah satu tujuan perkawinan di samping tujuan-tujuan lainnya. Oleh sebab itulah diatur hubungan antara seorang laki-laki dan perempuan dalam bentuk perkawinan. Hal ini dimaksudkan agar mereka memperoleh anak cucu yang akan meneruskan garis keturunan mereka. Dengan lembaga perkawinan, Allah Swt mengakui garis keturunan tersebut, begitu juga dengan masyarakat. Akan tetapi ketika lembaga perkawinan tidak diindahkan, maka Allah Swt tidak akan mengakui garis keturunan tersebut, termasuk masyarakat. Akibatnya secara vertikal (Allah Swt) dan horizontal (sosial kemasyarakatan) tidak ada kehormatan yang dimiliki berkenaan dengan keturunan yang dihasilkan. Ketika

- (a) Untuk menunjukkan perbedaan antara pernikahan dan perbuatan zina. Setidaknya ada 3 ketentuan yang menunjukkan perbedaan antara keduanya: (1) wali nikah bagi wanita sebagai rukun pelaksanaan akad nikah; (2) mahar sebagai kewajiban suami yang diserahkan kepada istri; (3) menyiarkan perkawinan minimal dengan 2 orang saksi sebagai rukun pelaksanaan akad nikah.
- (b) Untuk menunjukkan perbedaan antara akad pernikahan dan akad transaksi. Ketentuan akad dalam perkawinan adalah bersifat *ta'bid* (selamanya), dan tidak dibolehkan melakukan akad untuk jangka waktu tertentu seperti halnya akad sewa menyewa. Termasuk pula dengan adanya kewajiban mahar yang diberikan suami kepada istri, bukan kepada wali dari istri. Hal ini yang membedakannya dengan akad transaksi dengan menyerahkan sejumlah uang kepada pemilik barang sebagai pengganti.
- 2) Menkuatkan ikatan nasab dan kekerabatan keluarga dekat (*usrah al-nasab wa al-qurabah*). Hubungan nasab adalah ikatan paling dasar dalam hubungan kekerabatan. Ia menjadi motif dasar bagi seseorang untuk loyal dan berbakti kepada orang tua dan generasi di atasnya, dan di sisi lain bertanggung jawab atas keselamatan dan kesejahteraan anak dan generasi di bawahnya. Kondisi yang demikian memungkinkan keharmonisan dan ketentraman berkeluarga berdiri pada pijakan bertumbuh yang kondusif, tinggal kemudian bagaimana para pihak merawat dan mengukuhkannya. Sebaliknya jika keautentikan nasab

diragukan maka kasih sayang dan ketentraman dalam keluarga terancam sirna, besar kemungkinan akan timbul konflik yang melibatkan sejumlah pihak hingga pengabaian hak-hak anak yang masih memiliki ketergantungan yang tinggi kepada orang tua. Dengan demikian aturan-aturan yang memberikan kepastian hukum tentang keautentikan hubungan nasab dalam suatu kebutuhan yang fundamental.

Salah satu *maqāsid* utama dari aturan hukum kekeluargaan ialah meneguhkan ikatan nasab dari hal-hal yang dapat menimbulkan praduga yang meragukan keautentikan nasab. *Maqāsid* ini secara implisit dipahami dari sejumlah aturan dalam hukum kekeluargaan, di antaranya ialah: larangan poliandri; larangan laki-laki merdeka menikahi wanita budak kecuali dalam kondisi darurat; perbedaan hukum hubungan antara budak perempuan dengan majika laki-laki dan manjikan wanita dengan budak laki-lakinya dimana laki-laki diperbolehkan menggaulu budak perempuannya tetapi tidak demikian dengan wanita yang memiliki budak laki-laki; larangan bagi wanita meninggalkan rumah tanpa izin suami; larangan mengizinkan orang lain memasuki kediaman tanpa izin suami; kewajiban suami menafkahi istri sehingga ia tidak harus bekerja untuk memenuhi kebutuhannya sendiri. Subtansi dari ketentuan-ketentuan hukum dimaksud ialah

cukup beralasan secara hukum, oleh karena itu dapat mengabulkan permohonan para pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan pasal 46 ayat (2) UU No.23 Tahun 2006 Tentang Undang-Undang Administrasi kependudukan dan Catatan Sipil disebutkan bahwa Instansi pelaksana yang menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya salinan penetapan pengadilan oleh penduduk;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud, Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Kelahiran;

Menimbang, bahwa oleh karena kewajiban mengenai pencatatan pengangkatan anak bersifat imperatif namun dalam petitum para pemohon tidak disebutkan mengenai pencatatan pengangkatan anak, maka terhadap petitum para pemohon tersebut dapatlah dikabulkan, dan akan diperbaiki sebagaimana dalam amar penetapan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan para pemohon ini dikabulkan, maka terhadap ongkos perkara permohonan ini dibebankan kepada para pemohon;

Mengingat SEMA Nomor 3 Tahun 2005 Tentang pengangkatan anak, pasal 39 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, pasal 47 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006

Setelah menerima penyerahan anak tersebut para pemohon telah memelihara/merawat mendidik serta memberi segala kebutuhan hidup sehari-hari sebagaimana layaknya anak kandung sendiri. Dan untuk kepastian hukum, para pemohon mohon penyerahan anak yang dilakukan oleh para pemohon terhadap seorang anak perempuan yang bernama Alifa Ayudia Yumiaputri yang lahir di Pati pada tanggal 03 Januari 2015 yang merupakan anak dari ayah yang bernama Wahyudi dan ibu yang bernama Suparmiah di Pengadilan Negeri Pati dinyatakan sah pengangkatan anak angkat yang dilakukan oleh para pemohon, yakni : Agung Budi Pramono dan Kiswati terhadap seorang anak perempuan yang bernama Alifa Ayudia Yumiaputri.

Dalam dasar pertimbangan hukum pada penetapan tersebut menggunakan ketentuan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 3 Tahun 2005 Tentang Pengangkatan Anak. “Bahwa dalam melakukan pengangkatan anak agar memperhatikan dengan sungguh-sungguh”.

Kemudian dasar pertimbangan selanjutnya menggunakan UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak pasal 39. Yang dalam isi pasal tersebut menjelaskan posisi pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak yang dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan dalam melakukan pengangkatan anak tidak sampai memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dengan orang tua kandungnya. serta calon orang tua anak tersebut haruslah seagama dengan agama yang

dianut oleh calon anak angkat, dan apabila asal usul anak tidak diketahui maka agamanya mengikuti mayoritas penduduk setempat.

Selain menggunakan dasar hukum yang terdapat dalam UU No. 23 Tahun 2002 pasal 39, Pengadilan Negeri Pati dalam dictum penetapannya juga mempertimbangkan menggunakan dasar hukum yang terdapat dalam Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak pasal 9, pasal 12, pasal 13. Yang dalam pasal-pasal yang tertera di atas berisi penjelasan mengenai pengangkatan anak dapat dilakukan berdasarkan adat istiadat setempat dan dapat meminta permohonan penetapan pengadilan agar mendapatkan kepastian hukum. Dan menjelaskan pula mengenai syarat-syarat pengangkatan anak. Serta syarat-syarat bagi calon orang tua angkat.

Dari dasar pertimbangan hukum hakim Pengadilan Negeri Pati di atas dalam dictum penetapannya sudah adil dan sangat memperhatikan dengan cermat resiko yang terjadi bila pengangkatan anak tersebut di kabulkan, yakni pengangkatan anak yang dilakukan tidak memutus hubungan darah antara anak yang diangkat dengan orang tua kandungnya. Kemudian mengenai calon orang tua angkat harus seagama dengan agama yang dianut oleh calon anak angkat.

Akan tetapi yang menjadi permasalahan di sini adalah mengenai kewenangan absolut dalam menerima dan memutus perkara pengangkatan anak di atas yang para pemohonnya menganut agama islam. Seharusnya kewenangan tersebut di pegang oleh Pengadilan Agama. Hal ini dalam

tentang pelaksanaan pengangkatan anak (pasal 4). Sehingga hal ini sejalan dengan asas *lex superiori derogate lex inferiory* (peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi), ketentuan undang-undang yang ada harus lebih di dahulukan daripada ketentuan Buku II pengadilan umum. Begitu juga dengan persoalan pengangkatan anak yang beragama islam maka ketentuan dalam pasal 39 UU No.23 tahun 2002 harus didahulukan dari ketentuan Buku II, yakni status anak angkat tidak boleh dinasabkan kepada orang tua kandungnya dan tidak dapat saling mewarisi.

Jadi, hadirnya UU No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak dan PP No.54 tahun 2007 tentang pelaksanaan pengangkatan anak telah secara proporsional mempertimbangkan alasan-alasan hukum yang dapat dijadikan dasar dan menjadi arah baru sebagai pedoman peraturan pengangkatan anak di indonesia dan secara otomatis ketentuan *Staasblad* 1917:129 yang mentransformasikan anak angkat menjadi anak kandung serta dapat mewarisi tidak berlaku lagi. Melihat beberapa pertimbangan hukum hakim dalam mengeluarkan penetapan Pengadilan Negeri Pati terkait permohonan pengangkatan anak bagi pemohon muslim No.69/Pdt.P/2019/PN.Pti tersebut sudah benar dan adil karena pelaksanaan pengangkatan anak tidak sampai mengubah status anak angkat menjadi anak kandung. Walaupun kewenangan absolut dalam menangani perkara pengangkatan anak bagi pemohon muslim masih menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama sesuai pasal 49 UU No.3 tahun 2006. Akan tetapi bila Pengadilan Negeri menerima dan memutus

Serta Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksana Pengangkatan Anak pasal 4 “pengangkatan anak tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dengan orang tua kandungnya”.

Adapun jika di analisis dengan *al-maqasid al-khassah* dalam bab pernikahan menurut Jamaluddin Atiyyah di atas, maka tujuan pengangkatan anak (adopsi) yang dimaksud oleh pertimbangan hukum hakim dalam Penetapan Permohonan Perkara Pengangkatan Anak Bagi Pemohon Muslim No.69/Pdt.P/2019/PN.Pti tersebut telah sesuai dengan tujuan dari penyiaratan pernikahan yakni menjaga garis keturunan. Islam melarang keras mengadopsi anak dengan tujuan menjadikan anak angkatnya tersebut sebagai anak keturunannya sendiri.

Sedangkan disisi lain, dalam dasar hukum Peradilan Umum dalam menangani perkara pengangkatan anak bagi pemohon muslim terdapat pada Buku II Edisi 2007 Tentang Peradilan Umum, terbitan Mahkamah Agung RI Tahun 2009 pada Alinea 2 mengenai Teknis administrasi dan teknis Peradilan perdata umum Sub Bab “PERMOHONAN” Angka 7 di sebutkan bahwa “permohonan pengangkatan anak yang diajukan oleh pemohon beragama Islam dengan maksud untuk memperlakukan anak angkat tersebut sebagai anak kandung dan dapat mewarisi maka permohonan diajukan ke Pengadilan Negeri, sedangkan apabila dimaksudkan untuk dipelihara maka permohonan diajukan ke Pengadilan Agama”. Jika penetapan tersebut sesuai dengan isi daripada buku II Pengadilan Umum, maka hal ini tidak sesuai

Dalam hal ini hakim Pengadilan Negeri Pati dalam menetapkan permohonan pengangkatan anak bagi pemohon muslim sudah adil dan sesuai dengan *maqāṣid syarī'ah*, yaitu:

- a. UU No.23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak yang termaktub kedalam Pasal (3) bahwa “keyakinan yang di anut oleh calon orang tua yang berkenan mengadopsi harus sepadan dengan keyakinan yang di anut oleh calon anak yang bersedia di adopsi” (*ḥifdh al-dīn*)
- b. Pengangkatan anak yang dilakukan oleh pemohon terhadap Alifa Ayudia Yumiaputri dapat memelihara jiwa (*ḥifdh al-nafs*) anak yang diangkatnya, sebab bisa jadi orang tua anak tersebut dari keluarga yang ekonominya menegah dan mengakhawatirkan anaknya tidak bisa mendapatkan hidup yang layak sehingga ia rela melepaskan anaknya untuk dirawayat oleh keluarga yang ekonominya lebih mampunya darinya yang belum diberikan kepercayaan untuk mendapatkan anak. Sehingga hal ini dapat mempertahankan keberlangsungan hidup anak tersebut.
- c. Dari pengangkatan anak yang terjadi antara pemohon terhadap anak yang bernama Alifa Ayudia Yumiaputri dapat memelihara akal (*ḥifdh al-aql*) anak tersebut, maksudnya adalah dengan pemohon tersebut mengangkat anak yang bernama Alifa Ayudia Yumiaputri, anak tersebut dapat melanjutkan sekolahnya atau pemenuhan hak intelektualnya yang mungkin selama ini belum dia dapatkan dari orang tua kandungnya

menetapkannya menggunakan dasar hukum dalam pasal 39 UU No. 23 Tahun 2002 Tentang perlindungan anak dan dalam pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksana Pengangkatan Anak yang telah sesuai dengan tujuan dari pensyariaan pernikahan yakni menjaga garis keturunan dalam *al-maqasid al-khassah* dalam bab pernikahan. Sedangkan mengenai kewenangan Pengadilan Negeri dalam menerima, mengadili, dan memutus perkara pengangkatan anak bagi pemohon muslim. Yang seharusnya menjadi wilayah kewenangan Pengadilan Agama dalam memutus perkara tersebut. Hal ini tidak sesuai dengan *darūriyāt al-khams* khususnya pemeliharaan agama (*ḥifdh al-dīn*).

B. Saran

1. Untuk Buku II Edisi 2007 Tentang Peradilan Umum, terbitan Mahkamah Agung RI Tahun 2009 pada Alinea 2 mengenai Teknis administrasi dan teknis Peradilan perdata umum Sub Bab “PERMOHONAN” Angka 7 seharusnya di perbarui sesuai peraturan yang berada di atasnya sehingga tidak menimbulkan kontra-posisi di setiap peraturan yang mengatur terkait pengangkatan anak.
2. sejak adanya perubahan terhadap pasal 49 dalam UU No.3 Tahun 2006 seharusnya Pengadilan Negeri tidak lagi berwenang dalam menerima serta memutus perkara pengangkatan anak bagi pemohon muslim, sebab dalam pasal 49 tersebut sudah jelas bahwa yang berhak menangani perkara pengangkatan anak bagi pemohon muslim adalah pengadilan agama. Sehingga di harapkan lebih di fokuskan kembali mengenai wilayah

- Harahap, Yahya. *Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Ibn ‘Ashur, Muhammad Tahir. *Maqasid Al-Shari’ah Al-Islamiyyah*. Cetakan ke-2. Ordon-Oman: Dar Al-Nafa’is, 2001.
- Ibn Fāris, Abū Al-Ḥsayn Aḥmad. *Mu’jam Muqāyis Al-Lughah*. Cetakan ke-2, Jilid ke-5. Kairo: Maktabah Mustafa Bab Al-Halibi Wa Ahladuhu, 1392 H.
- Ibn Sayyidah, ‘Ali Ibn Isma’il. *Muhkam Al-Muhit Al-A’zam Fi Al-Lughah*. Cetakan ke-1, Jilid ke-6. Kairo: Maktabah Mustafa Bab Al-Halibi Wa Ahladuhu, 1392 H.
- Jauhar, Ahmad Al-Mursi Husain. *Maqashid Syariah*. Cetakan ke-3. Jakarta: Amzah, 2013.
- Mardani. *Ushul Fiqh*. Edisi ke-1, Cetakan ke-3. Jakarta: Rajawali Pers, 2014.
- Masruhan. *Metodologi Penelitian Hukum*. Surabaya: Hilal, 2013.
- Muhammad, Abdulkadir. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Cetakan ke-1. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004.
- Mustofa Sy. ”Arah Baru Pengangkatan Anak Di Indonesia”. *Mimbar Hukum dan Peradilan*, Ed.74. 2011.
- Nasution, Khoiruddin. *Islam Tentang Relasi Suami dan Istri : Hukum Perkawinan*. Yogyakarta: Academia, 2004.
- Nasution, Khoiruddin. *Islam Tentang Relasi Suami Istri: Hukum Perkawinan 1*. Cetakan ke-1. Yogyakarta: Academia Dan Tazzafa, 2004.
- Nurhayati, Ali Imran Sinaga. *Fiqh Dan Ushul Fiqh*. Jakarta: Prenada Media Group, 2018.
- Pandika, Rusli. *Hukum Penagngkatan Anak*. Cet. 1. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Ramulyo, Idris. *Hukum Perkawinan Islam: Suatu Analisis Dari Undang-Undang No.1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*. Cetakan ke-1. Jakarta: Bumi Aksara, 1996.
- Raysuni, Ahmad. *Nazariyyah Al-Maqasid ‘Inda Al-Shatibi*. Herndon-Virginia: The International Institute Of Islamic Thought, 1995.
- Rofiq, Ahmad. *Hukum Islam di Indonesia*. Cetakan ke-1. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1995.
- Rohman, Holilur. *Metode Penetapan Hukum Islam Berbasis Maqasid Al-Syariah : Teori dan Penerapannya Pada Bab Hukum Ibadah, Hukum Ekonomi Syariah, Hukum Perkawinan Islam, Sosial, Kesehatan, Pendidikan, dan Kebijakan Pemerintah*. Cetakan ke-1. Yogyakarta: Magnum Pustaka Utama, 2020.
- Sanusi, Ahmad, Sohari. *Ushul Fiqh*, Edisi ke-1, Cetakan ke-3. Depok: Rajawali Pers, 2019.

